PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang :

a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan perlu disesuaikan ;

b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
10. Pasar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa ;
11. Pasar Daerah adalah Pasar Umum yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
12. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain dilingkungan pasar yang beradius 300 m ;
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
14. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas Pasar ;
15. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los atau bangunan lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan swasta ;
16. Rumah Toko (Ruko) adalah sebuah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun dilingkungan Pasar ;
17. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan dan gudang yang dibangun dilingkungan Pasar ;

18. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan ;
19. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan ;
20. Pasar Kelas I adalah pasar yang memperoleh pendapatan retribusi rata-rata minimal Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
21. Pasar Kelas II adalah pasar yang memperoleh pendapatan retribusi rata-rata dibawah pendapatan retribusi Pasar Kelas I ;
22. Pejabat/Petugas pasar adalah Pejabat/Petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Bupati ;
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

B A B II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar dan/atau pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan/pemanfaatan fasilitas pasar yang berupa pelataran, los dan/atau bangunan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pasar dan/atau pemakaian fasilitas pasar ;

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pasar dan/atau pemakaian fasilitas pasar, yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat, luas dan kelas pasar yang dipergunakan.

B A B V
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pasar yang meliputi biaya investasi, biaya penyusutan, biaya administrasi, biaya kebersihan dan keamanan.

B A B VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian Ruko, Togu, Kios dan Los ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian Ruko dan Togu di pasar kelas I dikenakan Rp 850.000,00/m²
b. Pemakaian Ruko dan Togu di pasar kelas II dikenakan Rp 700.000,00/m²
c. Pemakaian Kios di pasar kelas I dikenakan sebesar Rp 550.000,00/m²
d. Pemakaian Kios di pasar kelas II dikenakan sebesar Rp 350.000,00/m²
e. Pemakaian Los di pasar kelas I dikenakan sebesar Rp 325.000,00/m²
f. Pemakaian Los di pasar kelas II dikenakan sebesar Rp 200.000,00/m²

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan uang pembayaran pemakaian Ruko, Togu, Kios atau Los yang ditempati setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun ;

(3) Setelah batas akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya izin perpanjangan selama 5 (lima) tahun berikutnya sebagai berikut :

a. Pasar Klas I
   1) Untuk ruko dan togu sebesar Rp 70.000,00/m²
   2) Untuk kios sebesar Rp 60.000,00/m²
   3) Untuk los sebesar Rp 40.000,00/m²

b. Pasar Klas II
   1) Untuk ruko dan togu sebesar Rp 50.000,00/m²
   2) Untuk kios sebesar Rp 40.000,00/m²
   3) Untuk los sebesar Rp 30.000,00/m²

(4) Selama jangka waktu pemakaian untuk merubah bentuk atau fungsi bangunan dan/atau memindah tangankan ke pihak lain harus mendapat ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;

(5) Apabila merubah bentuk bangunan atau fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan biaya sebagai berikut :

a. Untuk ruko/togu Klas I sebesar Rp 1.100.000,00 ;

b. Untuk ruko/togu Klas II sebesar Rp 1.000.000,00 ;

c. Untuk Kios Klas I sebesar Rp 500.000,00 ;

d. Untuk Kios Klas II sebesar Rp 400.000,00 ;

e. Untuk Los Klas I dan II sebesar Rp 200.000,00.

(6) Apabila pemakai memindah tangankan ke pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan biaya sebagai berikut :

a. Pasar Klas I
   1) Untuk ruko dan togu sebesar Rp 600.000,00 ;
   2) Untuk kios sebesar Rp 500.000,00 ;
   3) Untuk los sebesar Rp 300.000,00.

b. Pasar Klas II
   1) Untuk ruko dan togu sebesar Rp 500.000,00 ;
   2) Untuk kios sebesar Rp 400.000,00 ;
   3) Untuk los sebesar Rp 250.000,00.

Pasal 9

(1) Bagi pedagang yang menggunakan lingkungan pasar dan di luar lingkungan pasar yang usahanya berkaitan dengan aktivitas pasar, dikenakan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;

(2) Ketentuan pemungutan retribusi pelayanan pasar di luar lingkungan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati ;

(3) Khusus untuk pasar ikan, setiap memasukan berbagai jenis ikan ke pasar ikan dikenakan retribusi sebesar 1% (satu persen) dari harga penjualan.

B A B VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VIII
KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 11

(1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ;

(2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/ meninggalkan barang dagangannya didalam Pasar Daerah, dikenakan Retribusi sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah tarif yang berlaku ;

(3) Apabila didalam waktu 2 (dua) jam sesudah Pasar dimulai, pemegang hak tidak mempergunakan tempatnya (selain kios atau los yang tertutup), petugas pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum dapat tempat, dan bila yang berhak menempati datang, pedagang yang menempati sementara harus pindah dari tempat itu, dan pemakaian tempat tersebut di atas, dikenakan dengan tarif harian yang berlaku ;

(4) Bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai kegiatan di Lingkungan Pasar Daerah sebagai tempat berjualan dan/atau usaha lainnya dikenakan retribusi.

B A B IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut di wilayah Daerah.

B A B X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;

(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

B A B XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

B A B XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;

(3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;

(2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 19

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ;

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran reribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 diterbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B XVI
KADALUWARSA

Pasal 21

(1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
   a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
   b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 22

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B A B XVIII
PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XX
PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
   d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
   e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
   f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
   g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
   h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
   i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
   j. Menghentikan penyidikan ;
   k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA TANGGAL 22 NOPEMBER 2001 NOMOR 5 TAHUN 2001 SERI B.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O

Drs. EC. S A L A M
Pembina Utama Muda
NIP 510027150

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2001

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	TEMPAT PENJUALAN	JENIS DAGANGAN	PASAR KELAS I		PASAR KELAS II
			LANTAI BAWAH Rp/m² /hari	LANTAI ATAS Rp/m² /hari	Rp/m² /hari
1	2	3	4	5	6
A.	RETRIBUSI TEMPAT BERJUALAN PADA TEMPAT-TEMPAT TERTENTU (KHUSUS)				
	1 Tempat-tempat Khusus	Membongkar/memuat barang dagangan dengan mempergunakan kendaraan :			
		a. Truk	2.300,00		2.300,00
		b. Truk Gandengan	5.750,00		5.750,00
		c. Cikar	550,00		550,00
	2 Tempat-tempat Khusus	Penitipan :			
		a. Dokar	100,00		100,00
		b. Becak	100,00		100,00
	3 Tempat-tempat Khusus	Kamar Mandi/WC/Toilet			
		a. Mandi/Hajat besar	300,00	300,00	300,00
		b. Hajat kecil	200,00	200,00	200,00
	4 Tempat-tempat Khusus	Penjualan ayam dan sejenisnya			
		a. Lesehan, eceran, perekor	100,00		100,00
		b. Menggunakan sepeda rengkek/ranji, perengkek/ranji	350,00		350,00
	5 Tempat-tempat Khusus	1. Penjualan Burung :			
		a. Memakai sepeda, per sepeda	350,00		350,00
		b. Memakai pikulan, per pikulan	250,00		250,00
		2. Penjualan ternak :			
		a. Lembu, kerbau, kuda, perekor	1.500,00		1.500,00
		b. Kambing, domba, per ekor	700,00		700,00
		c. Babi, per ekor	2.500,00		2.500,00
		3. Pemindahan Hak Milik Hewan			
		a. Lembu, kerbau, kuda, perekor	2.500,00		2.500,00
		b. Kambing, domba, per ekor	1.500,00		1.500,00
		c. Babi, per ekor	2.500,00		2.500,00
		4. Penjualan dengan memakai mobil keliling, per mobil :			
		a. Jual jamu	2.300,00		2.300,00
		b. Jual konfeksi	2.300,00		2.300,00
		5. Penjualan dengan memakai sepeda, per sepeda :			
		a. Jual beras	250,00		250,00
		b. Jual sayuran	250,00		250,00
		c. Jual ketela pohon, ketela rambat dan jenis ubi lainnya	250,00		250,00
		6. Pedagang sepeda	250,00		250,00
B.	RETRIBUSI TEMPAT BERJUALAN DENGAN CARA LESEHAN, EBERAN ATAU PANCAAN				
	1 Tempat Khusus	Jenis : Sayuran, buah-buahan, jamu gendong dan sejenisnya, ikan kering, lauk pauk (tahu, dls), alat-alat dapur, kacang-kacangan, alat-alat pertanian/pertukangan dan gerabah/palen	100,00		100,00
	2 Tempat Khusus	Jenis : Ubi-ubian, bumbu/empon-empon, ikan basah, daging, sandang, makanan dan minuman	150,00		150,00

1	2	3	4	5	6
C.	**RETRIBUSI TEMPAT BERJUALAN DI KIOS**				
	1 Kios	Jenis : Pangan, sayuran, kacang-kacangan, ubi-ubian, ikan basah, ikan kering, lau-pauk (tahu dls) empon-empon, jual jamu, minum, alat-alat pertanian/pertukangan, alat-alat rumah tangga, alat-alat tulis, perlengkapan jahit, makanan ternak, unggas, pertukangan dan gerabah/palen	150,00	150,00	150,00
	2 Kios	Jenis : Sandang, pracangan, bahan makanan, sembilan bahan pokok buah-buahan, daging, kerajinan, anyaman bambu, rotan, rotan, kerajinan tangan, alat-alat listrik, radio/TV dan sejenisnya, alat-alat/onderdil mobil/sepeda motor/sepeda dsb, mebel, alat-alat olah raga, obat-obatan, pupuk, penjualan barang mas-masan dan sejenisnya dan penjualan unggas	200,00	150,00	150,00
D.	**RETRIBUSI TEMPAT PENJUALAN DI LOS**				
	1 Los	Jenis : Pangan, sayuran, kacang-kacangan, ubi-ubian, ikan basah, ikan kering, lauk-pauk (tahu dls) empon-empon, jual jamu, minum, alat-alat pertanian/pertukangan, alat-alat rumah tangga, alat-alat tulis, perlengkapan jahit, makanan ternak, unggas pertukangan dan gerabah/palen	100,00	100,00	100,00
	2 Los	Jenis : Sandang, pracangan, bahan makanan, sembilan bahan pokok buah-buahan, daging, kerajinan, anyaman bambu, rotan, rotan, kerajinan tangan, alat-alat listrik, radio/TV dan sejenisnya, alat-alat/onderdil mobil/sepeda motor/sepeda dsb, mebel, alat-alat olah raga, obat-obatan, pupuk, penjualan barang mas-masan dan sejenisnya dan penjualan unggas	150,00	150,00	150,00
E.	**RETRIBUSI TEMPAT PENJUALAN DI DALAM RUKO DAN TOGU**				
	1 Ruko dan Togu	Jenis : Kerajinan kulit/bambu/rotan/mebel, alat-alat kendaraan bermotor/ sepeda barang-barang elektronil/jam dinding/arloji/kacamata (optik), jamu/apotik, obat-obatan, gerabah/palen/keramik, buah-buahan, perkantoran dan kegiatan perbankan	250,00		250,00
	2 Ruko dan Togu	Jenis : Sandang/konfeksi, mobil/sepeda motor/sepeda, mas-masan	350,00		350,00
F.	**RETRIBUSI TEMPAT PENJUALAN DI LINGKUNGAN PASAR**				
	YANG USAHANYA BERKAITAN DENGAN AKTIVITAS PASAR		50,00	25,00	25,00

Catatan :

1. Penarikan retribusi tersebut pada huruf A s/d E diatas berlaku untuk sekali waktu berjualan.
2. Waktu berjualan ke I : mulai jam 00.00 s/d 12.00 WIB.
   Waktu berjualan ke I : mulai jam diatas jam 12.00 s/d 21.00 WIB.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. Penjelasan Umum

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 dan 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Yang dimaksud bangunan lainnya meliputi kios, toko gudang dan rumah toko.

Pasal 4 s/d 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

ayat (2) huruf b :

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada Pemerintah Daerah. Contoh :
  - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
  - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 22 s/d 28 : Cukup Jelas.